

# ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penyusunan APBD  
Cara Komprehensif

Yunita Anggarini, S.E., M.Si.  
Puranto, S.E., M.M.

PUSTAKAAN

**EKOM**

Febru/2010



**UPP STIM YKPN**

IKUT MENCERDASKAN BANGSA

# ANGGARAN BERBASIS KINERJA:

Penyusunan APBD Secara Komprehensif

SUMBANGAN BUKU PERPUSTAKAAN STIE TRIANANDRA	
Nama Alumni	
NIM	
Alumni Tahun	
Tanda Tangan	

Dra. Yunita Anggarini, M.Si.  
B. Hendra Puranta, S.E., M.M.

# ANGGARAN BERBASIS KINERJA: Penyusunan APBD Secara Komprehensif

EDISI PERTAMA  
Cetakan Pertama, Februari 2010

Penulis:

Dra. Yunita Anggarini, M.Si.

B. Hendra Puranta, S.E., M.M.

Penerbit/Pencetak:

UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7, Yogyakarta 55581, Telp./Faks. (0274) 889317

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

## Kutipan Pasal 72:

### Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

ISBN: 978 - 979 - 3532 - 37 - 0

## KATA PENGANTAR

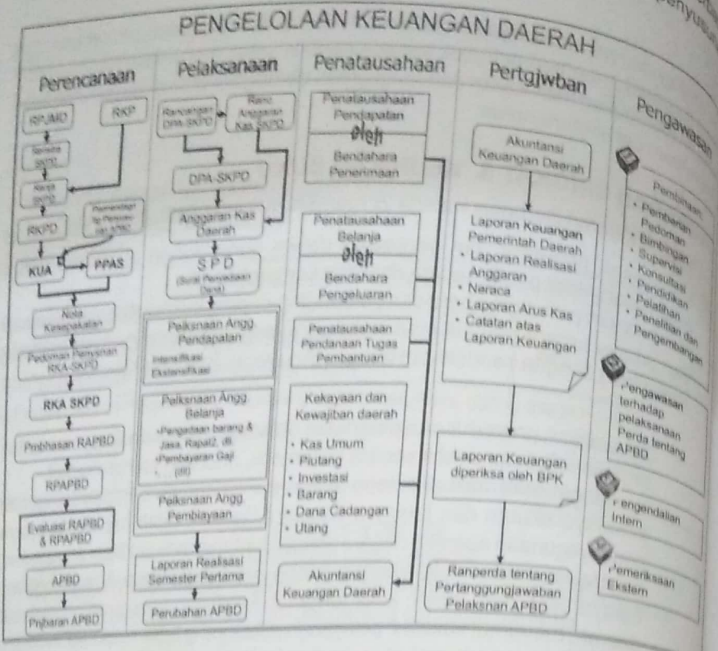
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang dengan rahmat dan ridho-Nya telah memben petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Buku ini merupakan hasil kajian dan rangkuman berbagai jurnal, buku literatur, hasil eksperimen dan *lecture notes*.

### GAMBARAN SINGKAT & KEUNIKAN BUKU

Buku Anggaran Berbasis Kinerja ini memiliki dua keunikan, antara lain:

1. Menyajikan prosedur dan persoalan dalam penyusunan anggaran untuk organisasi sektor publik secara rinci dan komprehensif.
  2. Menawarkan paradigma baru dan perbandingan yang langka dalam hal konsep dan proses antara penyusunan anggaran yang selama ini berlaku (metode tradisional) dengan pendekatan terbaru (Anggaran Berbasis Kinerja).
1. Menyajikan prosedur dan persoalan dalam penyusunan anggaran untuk organisasi sektor publik secara sistematis, rinci dan komprehensif. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan dan lahirnya Otonomi Daerah, telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Adanya perilaku masyarakat yang makin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap transparansi keuangan, terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya *good governance* yang bertumpu pada kualitas, integritas dan kompetensi anggota-anggota DPRD serta aparatur pemerintah daerah termasuk instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, reformasi di bidang keuangan negara terus dilakukan. Terakhir, lahir Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang berfungsi sebagai penggerak (*driving force*) dengan ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Reformasi ini terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian direvisi lagi menjadi Permendagri Nomor 59/2007. Dengan lahirnya pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka diperlukan tulisan yang menjadi penjabaran penyusunan anggaran yang terinci dan sistematis. Buku ini menjadi alternatif solusi sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesulitan dan multi tafsir dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan proses penyusunan anggaran disajikan secara runtut dan terinci. Melalui ilustrasi yang lengkap diharapkan memberi manfaat bagi

para pengguna untuk memahami proses penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja secara utuh. Berikut ini rancangan *concept map* penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja secara komprehensif:



2. Menawarkan paradigma baru dan perbandingan yang langka dalam konsep dan proses antara penyusunan anggaran yang selama ini berlaku (metode tradisional) dengan pendekatan terbaru (Anggaran Berbasis Kinerja)

Sebelum diterapkan anggaran berbasis kinerja, penentuan besarnya pengeluaran atau alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu unit kerja selama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang memiliki dua ciri utama, yaitu: (a) anggaran disusun secara *incremental* dan (b) struktur dan susunan anggarannya bersifat *line-item*. Ciri-ciri lain dari anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistik; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya informasi-informasi penting tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah lingkup kepaluhan penggunaan anggaran.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki banyak kelemahan. Penggunaan teknik Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional khususnya kelemahan tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja serta pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja tersusun secara sistematis dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/ lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Buku

Buku ini mengenalkan pendekatan baru dalam penyusunan anggaran yang dikenal dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan paradigma baru dalam keilmuan penganggaran. Pendekatan ini menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penerapan ABK merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. Sistem penganggaran ini merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja. Sistem ini terutama berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Penganggaran berbasis kinerja menjadi metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Penyusunan ABK mendasarkan prosesnya pada perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas pengguna anggaran (*Budget Entity*).

**UNTUK SIAPA BUKU INI DITULIS**

Buku ini ditulis untuk kelompok pembelajar berikut ini: (1) Para Pemimpin Organisasi Sektor Publik dan Para Praktisi, (2) Dosen Pendidikan Tinggi, dan (3) Mahasiswa.

Bagi Para Pemimpin Organisasi Sektor Publik dan Para Praktisi, buku ini memberikan ilustrasi penyusunan anggaran yang komprehensif dan terinci sebagai panduan mereka untuk mengelola organisasi dan menyajikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Buku ini menyajikan paradigma dan wawasan baru dalam penyusunan anggaran, menjabarkan faktor-faktor kunci kesuksesan organisasi, pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. Materi buku ini menyajikan metode

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>vii</b>
 <b>BAB 1.</b>	 <b>PARADIGMA BARU DALAM MANAJEMEN DAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK</b>	 <b>1</b>
	KOMPETENSI UMUM	1
	KOMPETENSI DASAR	1
	PENDAHULUAN	2
	<i>GOOD GOVERNANCE</i>	3
	PERAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK	4
	REFORMASI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	6
	REFORMASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	7
	ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH	8
	PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	10
	ISU STRATEGIK TERKAIT PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA	13
	Pengalaman Penerapan di Beberapa Negara	13
	Pengalaman Penerapan di Indonesia	14
	Beberapa Kelemahan Penerapan	15
	Pembenahan yang Mesti Dilakukan	18
	RANGKUMAN	19
	LATIHAN SOAL	20
 <b>BAB 2.</b>	 <b>REFORMASI &amp; JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK</b>	 <b>21</b>
	KOMPETENSI UMUM	21
	KOMPETENSI DASAR	21
	PENDAHULUAN	22
	PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN DAERAH	23
	KONSEP AKUNTABILITAS ANGGARAN	23
	DASAR HUKUM ANGGARAN BERBASIS KINERJA	24
	REFORMASI REGULASI DALAM PENGANGGARAN	25
	PERKEMBANGAN DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	35
	TEKNIK-TEKNIK PENGANGGARAN DAERAH	36
	Anggaran dengan Pendekatan Tradisional	36
	Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM	40
	LATIHAN SOAL	53

**BAB 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN**

KOMPETENSI UMUM

KOMPETENSI KHUSUS

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM

PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN DI DAERAH

RUANG LINGKUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA SKPD)

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD = Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD)

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

KETERKAITAN PERENCANAAN STRATEGIK (RENSTRA),

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) DAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Perencanaan Strategik

Anggaran Berbasis Kinerja

Keterkaitan antara Renstra/Renja, ABK, dan SPM

RANGKUMAN

LATIHAN SOAL

**BAB 4. ANGGARAN BERBASIS KINERJA**

KOMPETENSI UMUM

KOMPETENSI KHUSUS

PENDAHULUAN

ARTI PENTING ANGGARAN DAERAH

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Latar Belakang

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja/ABK

(*Performance Based Budgeting*)

Perubahan-perubahan kunci tentang Penganggaran

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja	103
Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	104
PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA	104
Prinsip-prinsip Utama Anggaran Berbasis Kinerja	104
Aktivitas Utama Dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	107
Peranan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran	107
Siklus Perencanaan Anggaran Daerah	108
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	109
Pendahuluan	109
PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD	
PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	111
Kebijakan Umum APBD	111
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas	114
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD	115
RANGKUMAN	122
LATIHAN SOAL	123
<b>BAB 5. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH</b>	<b>125</b>
KOMPETENSI UMUM	125
KOMPETENSI DASAR	125
PENDAHULUAN	126
FUNGSI APBD	127
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN DALAM APBD	127
STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING	127
Pendapatan Daerah	129
Belanja Daerah	132
Pembiayaan Daerah	139
KODE REKENING PENGANGGARAN	143
STRUKTUR ANGGARAN SKPD	147
TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)	148
Penyusunan APBD	148
Penyusunan APBD berdasarkan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran terpadu dan Anggaran Kinerja	150
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)	152
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG: MEMPERMUDAH PENILAIAN KEWAJARAN DAN CAPAIAN KINERJA SKPD	156
Belanja Daerah	157
Belanja Tidak Langsung	158
Belanja Langsung	159
Pendekatan Standar Biaya Langsung atau Standar Biaya Total	160

**BAB 6.**

**ASPEK PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN KINERJA  
 DALAM ANGGARAN BERBASIS KINERJA**  
 KOMPETENSI UMUM  
 KOMPETENSI DASAR  
 PENDAHULUAN  
 ERA MANAJEMEN BERBASIS KINERJA  
 PENDEKATAN KINERJA DALAM PENGANGGARAN  
 KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS  
 KINERJA  
 STRUKTUR PROGRAM YANG JELAS UNTUK MENCAPAI  
 OUTPUT DAN OUTCOME YANG TERUKUR, SERTA  
 JELAS PENANGGUNG JAWABNYA  
 INDIKATOR KINERJA  
     Pengertian  
     Konsep "Value For Money" (VFM)  
     Jenis Indikator Kerja  
     Penentuan Indikator Kinerja  
     Laporan Akuntabilitas Kinerja  
 PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI PROGRAM  
 INFORMASI PENGUKURAN KINERJA  
 RANGKUMAN  
 LATIHAN SOAL

**BAB 7.**

**PENJABARAN, EVALUASI DAN PENETAPAN APBD**  
 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM  
 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS  
 PENDAHULUAN  
 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG APBD BESERTA  
 LAMPIRANNYA  
     Pengertian dan Tujuan  
     Kriteria Penyusunan  
     Teknis Penyusunan  
 PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA RAPERDA  
 APBD  
     Penyampaian  
     Sosialisasi (penyebarnya)  
     Pembahasan  
     Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Kepala  
     Daerah

**PENJABARAN APBD** 203  
     Penyusunan Raperda Kepala Daerah tentang Penjabaran  
     APBD 203  
**EVALUASI APBD** 205  
     Evaluasi APBD Provinsi 205  
     Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 206  
     Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan  
     Kepala Daerah tentang PENJABARAN APBD 207  
     Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD 209  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI DAERAH YANG  
 BELUM MEMILIKI DPRD** 210  
**SKEDUL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD** 211  
**PENYUSUNAN LAMPIRAN-LAMPIRAN RAPERDA TENTANG  
 APBD** 214  
**RANGKUMAN** 232  
**LATIHAN SOAL** 232

**BAB 8.**

**PELAKSANAAN ANGGARAN, DPA-SKPD & ANGGARAN KAS** 235  
 KOMPETENSI UMUM 235  
 KOMPETENSI KHUSUS 235  
 PENDAHULUAN 236  
 DASAR HUKUM 237  
 PENYUSUNAN RANCANGAN DPA-SKPD 237  
     Alur Pengerjaan dan Form DPA-SKPD 238  
     Mekanisme Penyusunan DPA-SKPD 239  
 TEKNIS PENYUSUNAN DPA-SKPD 240  
     Penyusunan DPA-SKPD 1 242  
     Penyusunan DPA-SKPD 2.1 244  
     Penyusunan DPA-SKPD 2.2 246  
 ANGGARAN KAS 252  
 RANGKUMAN 255  
 LATIHAN SOAL 255

**BAB 9.**

**PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD** 257  
 KOMPETENSI UMUM 257  
 KOMPETENSI KHUSUS 257  
 PENDAHULUAN 258  
 PENGERTIAN PERUBAHAN APBD 258  
 KEBIJAKAN UMUM SERTA PRIORITAS DAN PLAFON  
 ANGGARAN SEMENTARA (KUA DAN PPAS) PERUBAHAN  
 APBD 25  
 PERGESERAN ANGGARAN 26  
 PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN  
 SEBELUMNYA DALAM PERUBAHAN APBD 24  
 KEADAAN DARURAT 2  
 PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA 2

PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD  
 PENETAPAN PERUBAHAN APBD  
 PENYUSUNAN DPPA-SKPD  
 RANGKUMAN  
 LATIHAN SOAL

**BAB 10. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI  
 PEMERINTAH DAERAH**

KOMPETENSI UMUM  
 KOMPETENSI KHUSUS  
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
 DASAR HUKUM  
 KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
 PPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
 KUASA BUD  
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD  
 BENDAHARA  
 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN  
 DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN  
 PENATAUSAHAAN PENGELUARAN  
 DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN  
 PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)  
 PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
 PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)  
 PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
 PENGGUNAAN DANA  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA  
 PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
 PELAKSANA PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
 DOKUMEN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
 LAPORAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
 PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS  
 LAPORAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS  
 PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP  
 PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS  
 RANGKUMAN  
 LATIHAN SOAL

**BAB 11. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**PELAKSANAAN APBD**  
 KOMPETENSI UMUM  
 KOMPETENSI KHUSUS  
 PENDAHULUAN

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA	342
KEBIJAKAN AKUNTANSI	343
Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi	343
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN	344
JENIS LAPORAN KEUANGAN	345
KARAKTERISTIK KUALITATIF DAN PRINSIP AKUNTANSI	
PELAPORAN KEUANGAN	347
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	348
PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN	
PELAKSANAAN APBD	350
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN	
KEUANGAN DAERAH	353
RANGKUMAN	354
LATIHAN SOAL	355

DAFTAR PUSTAKA	357
GLOSSARY	361

# ANGGARAN BERBASIS KINERJA

## Penyusunan APBD Secara Komprehensif

### GAMBARAN SINGKAT & KEUNIKAN BUKU

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, diperlukan tulisan yang menjadi penjabaran penyusunan anggaran yang terinci dan sistematis. Buku ini menjadi alternatif solusi agar tidak terjadi lagi kesulitan dan multi tafsir dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembahasan proses penyusunan anggaran disajikan secara runtut dan terinci. Melalui ilustrasi yang lengkap diharapkan memberi manfaat bagi para pengguna untuk memahami proses penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja secara utuh. Selain itu buku ini menawarkan perbandingan yang langka dalam hal konsep dan proses antara penyusunan anggaran tradisional dengan pendekatan terbaru (Anggaran Berbasis Kinerja).

### UNTUK SIAPA BUKU INI DITULIS

Bagi Para Pemimpin Organisasi Sektor Publik dan Para Praktisi

Buku ini menyajikan paradigma dan wawasan baru dalam penyusunan anggaran, menjabarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Bagi Dosen Pendidikan Tinggi

Buku ini memberikan kerangka yang sistematis untuk mengajarkan mata kuliah penyusunan anggaran organisasi sektor publik secara komprehensif. Materi dalam buku ini disajikan dalam bentuk konsep dan praktik yang bermanfaat sebagai alat praktik penyusunan anggaran sektor publik.

Bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Akuntansi

Buku ini secara mendalam membahas proses penyusunan anggaran sektor publik secara komprehensif, sehingga dapat menjadi panduan mahasiswa untuk mengelola masa depan organisasi melalui program dan penyusunan anggaran. Buku ini juga membuka wawasan mahasiswa tentang pentingnya pendekatan baru dalam penyusunan anggaran sektor publik yang lebih efisien dan efektif.

**Yunita Anggarini, S.E., M.Si.**, adalah *Trainer*, Konsultan, dan Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta (STIM YKPN). Berfokus pada karya-karya ilmiah dibidang Anggaran seperti Buku Anggaran Bisnis: Perencanaan, Analisis dan Implementasi, dan beberapa versi Buku Praktikum Anggaran Bisnis. Aktif pada berbagai kegiatan pelatihan di bidang anggaran. Beberapa klien pelatihan dan konsultasi antara lain: PT Badak, PT Semen T, Perusahaan Pupuk Iskandar Muda Aceh, PT Pupuk Kujang, PT SIER Surabaya, Harien Rakyat, Indofarma Tbk, PT Petrokimia Gresik, PT Arun NGL, PT Petro China, PT PLN, Sleman dan Bantul Yogyakarta, Staf Pemda Aceh, Papua dan Kalimantan Timur, dll.



**B. Hendra Puranto, S.E., M.M.**, adalah seorang Pembicara pada berbagai seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Studi dan Pengabdian Masyarakat (MEP) UGM, Forum Pengkajian & Pengembangan Kebijakan (KKD/LKD) Fakultas Ekonomi UGM, dan lainnya.

Selain sebagai seorang *Trainer*, ia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Anggaran pada Bidang Anggaran BPKD Kota Yogyakarta (2006-2007) dan Tenaga Ahli Bidang Keuangan DPRD Kota Yogyakarta (2007). Beberapa pengalaman kerja terkait antara lain Menyusun Neraca Kualitas Lingkungan Daerah Kota Yogyakarta (1999), Pemimpin kegiatan Pengendalian Anggaran pada Pemerintah Kota Yogyakarta (2006), dan lainnya.



INVEN  
ST  
No. Reg

ISBN: 978-979-3532-37-0